

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: EVALUASI MODEL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DANA BOS**

Novi Andriani¹, Nursaidah², Fina Umu Rif Athi³, Sidik Al Kahfi⁴, Fadhillah Izzatun Nisa⁵

¹ STAI Syubbanul Wathon Magelang² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

³ STAI Syubbanul Wathon Magelang⁴ Albukhary International University

⁵ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : ¹ novia@staia-sw.or.id, ² 242625218.nursaidah@uinbanten.ac.id, ³ finaura@staia-sw.or.id,
⁴ sidik.kahfi@student.aiu.edu.my, ⁵ 22204011009@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Financing management is one of the most important and primary factors in educational institutions, one of which is in MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo Magelang. The development of the financing management model in MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo is to adjust to the situation and conditions of the institution. The BOS funds received by MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo Magelang School in two stages, stage 1 (January-June) amounting to Rp 26,650,000 and stage 2 (July-December) amounting to Rp 26,650,000. The BOS MI unit cost is Rp 900,000.00 (Nine hundred thousand rupiah) per 1 (one) student every 1 (one) year. The management of BOS funds in this madrasah applies the principles of efficiency, effectiveness, transparency and accountability. The type of research is qualitative, because the data collected is in the form of words. The methods used in this study are observation and interviews. The sources in this study were the principal of MI Tarbiyatul Athfal, Mrs. Munthofiyah, S.Pd and the BOS treasurer, Mrs. Wahyu Okta Verinawati. The results of the study were that the implementation of the development of the BOS fund financing model was very good, because the BOS funds were well managed by MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo. The BOS fund report has also followed the Technical Guidelines determined by the Government and improved teacher performance.

Keywords: Management, BOS funds, performance

ABSTRAK

Manajemen pembiayaan adalah salah satu faktor yang sangat utama dan yang paling penting dalam lembaga pendidikan, salah satunya di MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo Magelang. Pengembangan model pengelolaan pembiayaan yang ada di MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari lembaga tersebut. Dana BOS yang diterima oleh Sekolah MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo Magelang dengan dua tahap, tahap 1 (Januari-Juni) sebesar Rp 26.650.000 dan tahap 2 (Juli-Desember) sebesar Rp 26.650.000. Satuan biaya BOS MI sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Pengelolaan dana BOS di madrasah ini menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Adapun jenis

penelitian ini yaitu kualitatif , karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala Sekolah MI Tarbiyatul Athfal ibu Munthofiyah, S.Pd dan bendahara BOS Ibu Wahyu Okta Verinawati. Adapun hasil penelitiannya yaitu implementasi pengembangan model pembiayaan dana BOS sudah sangat baik, karena dana BOS dikelola dengan baik oleh pihak MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo. Laporan dana BOSnya juga sudah mengikuti Juknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah serta meningkatkan kinerja guru.

Kata Kunci: *Manajemen, dana BOS, kinerja*

A. Pendahuluan

Sekolah yang berkualitas adalah salah satu capaian atau tujuan dari pendidikan Indonesia dan juga lembaga pendidikan yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari planning atau perencanaan sekolah tersebut. Perencanaan yang telah dibuat dan kemudian untuk mewujudkan itu semua salah satunya adanya pembiayaan pendidikan. Sepertinya akan sulit menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu apabila tidak disamai dengan pembiayaan yang baik pula. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap semangat dan kualitas dari tenaga pendidik. (Warisno 2021)

MI Tarbiyatul Athfal adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementrian Agama. Madrasah ini berada di Yayasan LP Ma'arif Kecamatan Tempuran dengan No SK Kelembagaan K/923711175, beralamat di Dusun Tugur, Desa Tugurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 111.2.33.08.0140 serta Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111.2.33.08.0140. Pada tahun 1967 Madrasah ini didirikan dengan luas tanah 1540 M persegi, dengan status tanah wakaf. Adapun batas-batas dari lokasi MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo adalah arah utara yang berbatasan dengan sawah, sebelah barat berbatasan dengan dusun Brigasan, sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Balai Desa Tugurejo dan sebelah timur berbatasan dengan makam. Madrasah ini dipimpin oleh Ibu Munthofiyah, S.Pd dengan No SK Kepala Sekolah 3994/PC/LPM/P.II/2020 dan Nomor Kepala Sekolah Nasional (NPSN) 60711393. Madrasah ini memiliki status akreditasi B dengan No dan SK Akreditasi sebagai berikut No.33.18.02437 No SK 044/ BAN SM-JTG/SK/X/2008.

Manajemen pembiayaan oleh Madrasah ini dilakukan sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Zymelman yaitu pembiayaan hanya menjelaskan tentang bantuan atau sumbangan dan penggunaan serta pengelolaan dan yang telah didapatkan oleh sekolah. Apabila sumbangan atau dana yang didapat digunakan dengan baik, maka akan menciptakan keefesienan dalam

manajemen pembiayaan disekolah tersebut. Adapun sumber Pendapatan Madrasah ini untuk mengelola kebutuhan madrasah yaitu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun termasuk lembaga pendidikan swasta namun di madrasah ini tidak ada pungutan biaya sedikitpun bagi siswa-siswi di karenakan wali murid yang masih tergolong ke dalam masyarakat yang menengah ke bawah. Oleh sebab itu, pihak sekolah harus benar-benar memanfaatkan bantuan dana BOS untuk operasional dan memenuhi kebutuhan madrasah.

Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyyah mempunyai peran yang sangat penting terhadap peningkatan saluran atau jalannya pendidikan di Indonesia. Hal ini tandai dengan menurunnya jumlah anak putus sekolah (DO) dan meningkatnya jumlah anak kembali ke bangku sekolah. Dalam konteks madrasah, aplikasi atau saluran dana BOS juga dinilai berhasil meningkatkan tujuan APK dan APM dalam tiga tahun terakhir. Dengan semikian, alokasi anggaran BOS yang terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2005 secara umum belum cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional secara relevan, termasuk di madrasah. Keadaan ini dapat di lihat dari hasil penilaian internasional, seperti PISA di mana tahun 2018 indonesia masih menempati nomor urut 74 dari 79 negara. Oleh sebab itu, Kementrian Agama sejak tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan perubahan capaian atau tujuan, adapun penyesuaian bantuan dana

BOS tidak hanya memperbaiki saluran pendidikan, akan tetapi juga memfokuskan peningkatan kualitas madrasah.

Pemerintah mengatakan bahwa biaya pendidikan seperti halnya keuangan yang diberikan untuk melaksanakan dan mengelola pendidikan. Kemudian, pembiayaan atau dana yang didapat dikelola dengan baik guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintahan sehingga menciptakan lulusan yang berkualitas dan unggul dalam bidangnya(Haryati, 2012). Adapun pembiayaan pendidikan tidak hanya uang akan tetapi juga bisa berbentuk barang, jasa maupun dalam bentuk yang lainnya guna untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.

Sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia membawa perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk mengatur pembiayaan pendidikan di wilayah masing-masing untuk kegiatan proses pembelajaran. Hal tersebut membawa dampak positif dan negatif. Pengertian desentralisasi pengelolaan pembiayaan pendidikan bisa berupa keterbukaan, sustanbilitas, keefektifan dan akuntabilitas. Dengan adanya keterbukaan tersebut pemerintah daerah akan lebih terbuka antara masyarakat dan pihak lainnya. Akan tetapi sifat keterbukaan yang dilakukan oleh pengelola biaya

pendidikan daerah tidak ada komitmen yang sama antara lembaga dan masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan adanya rasa tidak percaya kepada pengelola biaya pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan model manajemen pembiayaan khususnya madrasah merupakan prioritas pemerintah. Model manajemen pembiayaan pendidikan inilah yang akan membantu masyarakat dan pemerintahan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan (Haryati, 2012)

Model pengelolaan pembiayaan atau *financial management* model dikembangkan sebagai sebuah alat yang membantu organisasi atau perusahaan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Model ini dirancang untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan keuangan dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak. Pengembangan model pengelolaan pembiayaan dipicu oleh kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk menghadapi tantangan finansial yang kompleks. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti halnya perubahan keadaan pasar, persaingan ketat antara lembaga satu dengan lembaga lainnya serta diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Model pengelolaan pembiayaan dikembangkan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas. Dalam pengembangannya, model ini

melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, analisis keuangan, pengelolaan risiko, pengendalian biaya, dan manajemen kas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, model pengelolaan pembiayaan juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Saat ini, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai alat dan aplikasi digital untuk membantu mereka dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yaitu dengan observasi dan wawancara. Adapun narasumber yang dipilih oleh peneliti yaitu kepala sekolah MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo yaitu ibu Munthofiyah, S.Pd dan bendahara BOS. Setelah data dikumpulkan, penulis memilih teori apa yang dapat menyelesaikan atau membantu menyelesaikan rumusan masalah yaitu tentang pengembangan model manajemen pembiayaan. Peneliti menyajikan hasil yang telah didapat dalam menjawab rumusan masalah, peneliti menyajikan temuan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif data (Ismail & Sumaila, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Pembiayaan dan Manfaat Pengelolaan Pembiayaan

Secara leksikal awal kata pembiayaan yaitu dari biaya yang didefinisikan sebagai kebutuhan finansial yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan biaya didefinisikan sebagai nilai uang yang didapat dari sumber daya manusia disetiap lembaga pendidikan baik dari masyarakat sekitar, pemerintahan maupun dari donatur lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara rinci biaya pendidikan harus membuat rincian kebutuhan yang sangat urgen untuk kegiatan pembelajaran dan mengetahui jumlah barang yang diperlukan. (Mesiono & Roslaeni, 2021)

Pengelolaan pembiayaan di sekolah sangat penting karena pembiayaan yang tepat dan efisien adalah kunci untuk menciptakan mutu atau kualitas lembaga pendidikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa perlu adanya pengelolaan pembiayaan di sekolah (Maliki et al., 2022):

1. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana: Pengelolaan pembiayaan yang baik di sekolah dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan efisien dan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah.
2. Meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab (pelaporan): Dengan pengelolaan keuangan yang baik, sekolah dapat

menyediakan laporan keuangan yang transparan dan teratur, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk memantau penggunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

3. Meningkatkan akses pendidikan: Pengelolaan pembiayaan yang baik dapat membantu sekolah untuk memberikan saluran atau jalan pendidikan yang lebih luas bagi siswa yang kurang mampu secara finansial, melalui program beasiswa atau penggunaan dana bantuan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan: Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengadaan peralatan dan teknologi yang baru, memberikan pelatihan bagi guru dan staf sekolah, dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler.
5. Meningkatkan keberlanjutan program: Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, sekolah dapat memastikan keberlanjutan program dan kegiatan sekolah, sehingga dapat memperkuat posisi sekolah dan memperbaiki citra lembaga pendidikan.

Dengan adanya pengelolaan pembiayaan di sekolah, maka sekolah dapat menciptakan sistem keuangan yang terorganisir, transparan,

efektif, dan efisien sehingga kegiatan pembelajaran disekolah dapat dilaksanakan dengan efektif.

Pengembangan Model Pengelolaan Pembiayaan

Dalam lembaga pendidikan, sumber dana yang didapatkan belum bisa menjamin untuk meningkatkan kualitas atau mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena manajemen pembiayaan yang salah dalam pengelolaan, tidak adanya pengawasan, tidak adanya keterbukaan sehingga mendatangkan oknum tidak bertanggung jawab. Apabila hal itu terjadi, sebaiknya harus ditindaklanjuti sehingga menciptakan efek jera kepada oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut. Adapun model manajemen pembiayaan yang ada di Negara kita yaitu berbagai macam model pembiayaan pada dasarnya memiliki dasar yang berbeda. Perbedaan dasar tersebut bisa dilihat dari dasar pengalokasian dan dasar pemasukan atau penghasilan(Susan, 2019).

Sehubungan dengan berbagai macam model pembiayaan pendidikan, ada empat model biaya pendidikan, yaitu: 1) bantuan penuh yang didapat dari tingkat sekolah dasar sampai keperguruan tinggi; 2) tidak ada biaya untuk pendidikan tingkat perguruan tinggi untuk siswa pada usia yang telah ditentukan; 3) biaya pendidikan untuk tingkat SMA diberikan secara gratis akan tetapi pendidikan tingkat perguruan tinggi dikenakan penarikan SPP walaupun masih mendapatkan bantuan; 4) semua tingkat pendidikan wajib untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya

sendiri. Adapun dana yang bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan diperoleh dari kerjasama antara lembaga pendidikan dengan perusahaan, alumni sekolah, orang tua/wali murid.

Akan tetapi keadaan setiap sekolah yang ada di Negara kita memiliki kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan model pembiayaan yang terbaik untuk setiap lembaganya. Baiknya, beberapa model pembiayaan tersebut dibuat menjadi sebuah model yang baik sehingga dapat disesuaikan dengan lembaga pendidikan yang berbeda disetiap daerahnya. Model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran pemerintah, kontribusi orang tua/wali murid, dan sumbangan dari pihak lain seperti badan amal atau perusahaan swasta. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan model pengelolaan pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah:

1. Membuat rencana anggaran yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup semua biaya operasional dan investasi jangka panjang seperti renovasi atau pengadaan peralatan baru. Rencana anggaran harus disusun berdasarkan prioritas dan selalu diupdate setiap tahun.
2. Mempertimbangkan strategi pengumpulan dana dari sumber-sumber yang berbeda, seperti

mengorganisir acara penggalangan dana, mengajak partisipasi perusahaan swasta, dan mengoptimalkan sumbangan dari pihak lain.

3. Membuat program beasiswa untuk siswa yang membutuhkan bantuan keuangan untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka. Program ini dapat disusun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti prestasi akademik atau kriteria sosial-ekonomi.
4. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan alat bantu pengajaran lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan.
5. Membuat dan mengikuti peraturan dan prosedur pengelolaan keuangan yang jelas dan teratur. Hal ini dapat meliputi pembukaan rekening bank terpisah untuk kegiatan sekolah, penyimpanan dokumen keuangan secara teratur, dan pelaporan keuangan secara teratur kepada pihak yang berwenang.
6. Melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan, termasuk siswa, guru, orang tua/wali murid, dan staf sekolah. Hal ini dapat menciptakan atau meningkatkan keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Model pengelolaan pembiayaan yang baik harus mudah serta dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah yang berbeda. Hal ini dapat mencakup berbagai strategi dan inovasi, seperti pemanfaatan

teknologi dan membangun kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.

Pengembangan Model Strategi Pengelolaan Pembiayaan

Pengembangan model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah dapat juga dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan pembiayaan
Langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah, seperti biaya operasional, biaya kegiatan ekstrakurikuler, dan biaya peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan anggaran secara terperinci.
2. Penentuan sumber pembiayaan
langkah selanjutnya adalah menentukan sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Sumber pembiayaan dapat berasal dari dana sekolah, dana pemerintah, donatur, atau pihak swasta.
3. Pengelolaan dana sekolah dalam mengelola dana sekolah, sebaiknya sekolah memiliki sistem akuntansi yang transparan dan akurat. Hal ini akan memudahkan pengelolaan dana sekolah dan menghindari penyalahgunaan dana.
4. Penyusunan anggaran sekolah
sebaiknya menyusun anggaran secara terperinci dan memprioritaskan kegiatan yang

paling penting. Anggaran yang telah disusun sebaiknya disetujui oleh semua pihak yang terkait dan dilakukan monitoring secara berkala.

5. Pengelolaan dana donatur jika sekolah menerima dana dari donatur, sebaiknya dilakukan pengelolaan yang terorganisir dan transparan. Sekolah harus membuat laporan keuangan secara berkala dan menginformasikan kepada donatur mengenai penggunaan dana tersebut.
6. Kolaborasi dengan pihak terkait sekolah dapat melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah, yayasan, atau perusahaan, untuk memperoleh tambahan dana atau dukungan lainnya.

Dalam pengembangan model pengelolaan pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah, sebaiknya melibatkan semua pihak yang terkait, seperti guru, staf, murid, dan orang tua murid, untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Implementasi Perencanaan Anggaran BOS di MI Tarbiyatul Athfal

Program bantuan BOS dari pemerintah tahun 2020 telah diterima oleh MI Tarbiyatul Athfal. Mekanisme penyaluran selama dua tahap. Tahap 1 (Januari-Juni) sebesar Rp 26.650.000 dan tahap 2 (Juli-Desember) sebesar Rp 26.650.000. dalam proses perencanaan anggaran dana BOS madrasah mengikuti Juknis yang dikeluarkan oleh Bapak

Kamaruddin Amin selaku Direktur Jederal Pendidikan Islam Nomor 7330 tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta 27 Desember 2019. Satuan biaya BOS MI sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Pengelolaan dana BOS di madrasah ini menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Dana BOS di kelola madrasah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. Program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah sendiri. Setelah kegiatan atau program madrasah yang telah direncanakan kemudian di tuangkan ke dalam dokumen yang disebut dengan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah). Pada RKAM meskipun madrasah diberikan kewenangan dalam mengelola dana BOS, madrasah tetap mengacu pada Juknis dana BOS tahun anggaran 2020. Berikut adalah RKAM MI Tarbiyatul Athfal:

1. Menggunakan bantuan dana BOS untuk kepentingan belanja guru (honor /tenaga kependidikan tetapi tidak PNS serta pengeluaran untuk kegiatan guru) pada madrasah swasta lebih dari 30% dari jumlah keseluruhan dana BOS yang diterima dalam satu tahun, dengan persetujuan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten.
2. Biaya transportasi serta biaya lelah bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas di luar jam mengajar, mengikuti ketentuan batas kewajaran yang telah di

tetapkan oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Agama.

3. Menggunakan biaya untuk kegiatan yang termasuk kegiatan prioritas madrasah.
4. Menggandakan barang dengan prinsip transparan dan efisiensi rencana belanja serta untuk menentukan barang dan tempat pembeliannya.

Mempersiapkan spesifikasi teknis dan harga persiapan sendiri dengan harga perkiraan kecuali untuk nilai paling banyak Rp 10.000,00.

Tabel 1.1 RKAM di MI Tarbiyatul Athfal Tahun Anggaran 2020

No	Item	Uraian
1	Kegiatan Pembelajaran	Mendukung Pembelajaran CTL, Pembelajaran remedial dan pengayaan dan Pemantapan persiapan ujian.
2	Kegiatan Ekstrakurikuler	Diuraikan untuk Keagamaan, tahfidz dan BTA.
3	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Digunakan untuk PAS, PAT, UM, Simulasi Ujian dan Eavaluasi Pembelajaran Ekstrakurikuler.
4	Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa	Digunakan untuk Kegiatan Olahraga, Porda, O2SN dan Seni bagi Siswa.
5	Pengembangan Keprofesian Guru, Tendik dan Manajemen Madrasah	Digunakan untuk KKG, MGMP, Pembiayaan IHT dan Workhshop di Madrasah.
6	Pembayaran Honor Rutin	Digunakan untuk honor GBPNS dan Tendik, GBPNS Ekstrakurikuler, Tendik dan Pengelolaan keuangan BOS.
7	Pemeliharaan Sarpras	Digunakan untuk memperbaiki

	Madrasah	meubelair ruang kelas, pembelian meja dan kursi, perbaikan toilet madrasah, dan pemeliharaan printer dan laptop madrasah.
8	Pengembangan Perpustakaan	Digunakan pengembangan database perpustakaan 3-library dan pemeliharaan perabot perpustakaan.
9	Penerimaan Peserta Didik Baru	Digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan selama PPDB.
10	Masa Ta'aruf Siswa Madrasah	Digunakan untuk pembiayaan kegiatan selama matsama.
11	Pengelolaan Madrasah	Digunakan pembelian alat/bahan habis pakai, keperluan perkantoran, transportasi pengambilan dana di bank, pembiayaan kegiatan madrasah (madrasah hijau, sehat, adiwiyata) dan pelaksanaan pengelolaan madrasah melalui aplikasi (RKAM, ARD, Emis)
12	Langganan Jasa	Digunakan untuk biaya Listrik, air, telepon dan internet.
13	Pembelian/Pera watan Alat Multi Media	Digunakan untuk pembelian printer.
14	Upaya pencegahan Covid-19	Digunakan untuk membeli sabun cuci tangan, masker, hand sanitizer, disenfectan dan termogun.

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dengan adanya bantuan dana BOS dan mengikuti aturan dalam penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan Permendiknas No. 37 tahun 2010. Adapun isi dalam aturan tersebut yaitu bagi peserta didik menengah kebawah atau miskin, semua biaya pendidikan baik itu sekolah negeri maupun swasta dibebaskan. Kecuali untuk sekolah yang bertaraf internasional. Dengan adanya peraturan tersebut, pihak sekolah swasta dan negeri sangat terbantu dengan adanya bantuan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Adapun kebijakan dana BOS tersebut yaitu pendidikan gratis untuk sekolah swasta hanya sebesar 20% dari anggaran yang diterima.(Sukoco, 2019)

Jangkauan dana BOS dalam pelaksanaannya merupakan salah satu strategi untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam bidang pendidikan berkisar 20%. Dana yang didapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi dana yang didapat oleh pemerintah belum berkontribusi sepenuhnya bagi sekolah serta pelayanan sekolah terhadap siswa juga masih terbatas. Helnikusdita membuktikan bahwa dalam penelitiannya di di SMA N 4 Seluma terkait implementasi pelaksanaan dana BOS berjalan dengan baik selama pelaksanaan dana operasional sekolah di SMA N 4 Seluma mengikuti arahan dan aturan yang telah diberlakukan serta menggunakan pedoman teknis yang

sesuai dengan BOS SMA(Haryati, 2012).

Menurut Ari Setyoningsih dan Bambang Ismanto dalam penelitiannya di SMK Kristen BM Salatiga membuktikan bahwa kesenjangan masih terjadi dalam kegiatan pelaksanaan dan standar BOS di SMK Kristen BM Salatiga. Dalam kegiatan perancangan, dana BOS sudah sama dengan juknis BOS pada tahun 2020. Akan tetapi, dalam proses perencanaan masih terdapat ketidakseimbangan yang terdapat pada pengeluaran seperti halnya keperluan yang sangat mendesak sedangkan pengeluaran harus berdasarkan pada SPJ. Kegiatan proses juga terdapat kendala yaitu keterlambatan pencairan dana, dapat dilihat bahwa bantuan dana BOS merupakan salah satu sumber utama untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar di SMK Kristen BM Salatiga(Fadhila, 2021).

Pendapat lain di kemukakan oleh Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir hasil penelitiannya membuktikan bahwa implementasi bantuan dana BOS pada tahap pelaksanaan secara umum diwarnai dengan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketetapan atau ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan sikap yang kurang positif dari pengelola sekolah. Berdasarkan peneliti terdahulu dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan dengan baik dan lancar apabila

dalam proses pelaksanaan sesuai dengan Juknis yang telah diberlakukan. Jika di lapangan ditemukan yang tidak sesuai dengan Juknis maka dalam pelaksanaan akan terkena hambatan seperti terlambatnya pencairan dana BOS.

Implementasi Pelaksanaan

Anggaran BOS di MI Tarbiyatul

Athfal

Pelaksanaan anggaran BOS di madrasah dilakukan melalui dua kegiatan. *Pertama*, pembukuan dana BOS. *Kedua*, pelaporan dana BOS. Pembukuan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh madrasah, karena dengan dilakukannya pembukuan, akan membantu madrasah dalam mempertanggungjawabkan mengenai dana BOS untuk masa yang akan datang.

Sedangkan pelaporan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap madrasah guna memberikan konfirmasi pengelolaan dana BOS kepada Tim Pengelola Dana BOS dan akan berkesinambungan terhadap pencairan dana BOS tahun anggaran selanjutnya. Dalam pembukuan dana dan pelaporan dana BOS madrasah mengacu pada Juknis BOS tahun anggaran 2020. Berikut tahap pembukuan dan pelaporan Madrasah terkait anggaran dana BOS tahun anggaran 2020:

1. Pembukuan dana BOS

- a. Bendahara mencetak BKU dan buku pembantu, kemudian di tandatangani oleh kepala madrasah. kemudian mencatat semua

transaksi penerimaan dan pengeluaran

- b. Bendahara tidak membawa uang tunai kas melebihi Rp.10.000.00.
 - c. Bendahara BOS tidak menyalurkan saldo di rekening bank madrasah guna mempermudah pencairan.
 - d. Setiap bulan melakukan pembukuan pada BKU meskipun tidak ada transaksi dengan uraian NIHIL.
 - e. Mengarsipkan seluruh pembukuan sebagai bukti pengeluaran bantuan dana BOS seperti halnya kwitansi, nota, bon serta faktur dari toko pembelian barang.
 - f. Melakukan pengarsipan data keuangan sesuai dengan nomor dan tanggal kejadiannya.
- ##### **2. Pelaporan dana BOS**
- a. Melaporkan
Pertanggungjawaban dengan Formulir BO-08
Laporan ini berisi tentang surat pernyataan tanggungjawab bahwa dana yang diterima, kemudian digunakan dan apabila ada sisa atau dana yang lebih maka dikembalikan ke kas negara. Selain itu melaporkan seluruh kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan semua bukti pengeluaran di simpan di pihak Madrasah.

- b. Pencatatan Penyajian serta Penanganan Pengaduan Masyarakat

Laporan ini berisi rekapitulasi laporan penanganan pengaduan masyarakat di tingkat Madrasah.

- c. Laporan Aset

Laporan ini berisi hasil pembelian aset yang menggunakan dana BOS yang diterima pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pengawasan dan Pemeriksaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Juknis yang telah diberikan oleh pemerintah salah satunya yaitu petunjuk untuk menggunakan serta pertanggungjawaban dana BOS. Juknis tersebut juga menjelaskan bahwa, kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala. Adapun jenjang pelaporannya yaitu mulai dari tingkat pendidikan, kota/kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Pelaporan tersebut berisikan penyusunan RKAS, pembukuan, rekapitulasi penggunaan dana dan penanganan pengaduan masyarakat. Adapun kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dan yang lainnya. Jika apabila salah satu saja kegiatan tersebut tidak dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan juknis yang telah diberikan oleh pemerintah.

Adi Suardi, Ifnaldi, Murniyanto dan Hamengkubuwono dalam penelitiannya membuktikan bahwa kegiatan evaluasi penyaluran dan penggunaan bantuan dana BOS yang

dilakukan oleh sekolah merupakan salah satu alat untuk membantu pihak sekolah. Adapun evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam menggunakan serta mengelola dana BOS yang telah didapat. Akan tetapi, terdapat kendala dalam kegiatan evaluasi yaitu tidak sesuainya anggaran dengan kebutuhan pendidik serta pembangunan ruang kelas. Bantuan dana BOS tidak bisa digunakan dalam proses pembangunan tersebut, karena menyulitkan sekolah untuk pembangunan RKB harus terpisah dengan anggarannya dari bantuan dana BOS(Ason & Mardiana, 2020).

Wasiah Sufi, Eka dan Aprilia Zulvina dalam penelitiannya di SD Negeri 64 Kota Pekanbaru, membuktikan bahwa pengawasan di SD Negeri 64 Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa situasi dan kondisi sekolah cukup baik. Akan tetapi, masih kurangnya kerja sama pihak sekolah dengan pengawas dalam pelaksanaan atau pengelolaan bantuan dana BOS di SD Negeri 64 Pekanbaru sehingga dibutuhkan komunikasi antara pihak sekolah dan pengawas(Wirian, 2022).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indra Lesmana Taddi Gustaaf B. Tampi dan Helly F Colandam, hasil penelitian membuktikan bahwa fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Tim Pengelola Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hanya terlaksana dengan baik itu perlu dimaksimalkan. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sekolah berupa

ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban dengan kenyataan di lapangan dan ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti teknis pedoman berupa papan informasi tidak ada penggunaan dan pengelolaan dana BOS di sekolah. Kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan atau penggunaan dana BOS di sekolah, Tim Pengelola Kabupaten memberikan teguran dan melaksanakan / mengoreksi atau mengoreksi (Arif Syukri Nasution, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan anggaran BOS itu akan di lakukan hal itu bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS. Sehingga pihak pengawas dengan tim pengelola BOS harus menjalin komunikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam Laporan Pertanggungjawaban terkait dana BOS.

Implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Anggaran BOS di MI Tarbiyatul Athfal

1. Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Setelah madrasah melaksanakan RKAM, Tim Pengelola BOS melakukan pemeriksaan terhadap madrasah. Biasanya pemeriksaan di lakukan secara kolektif. Artinya pengajuan RKAM di print out kemudian di kumpulkan ke LP Ma'arif. Setelah itu LP Ma'arif mengumpulkan ke Kantor Kementrian Agama. Setelah RKAM di periksa oleh

Kemenag, maka bagi madrasah yang masih ada kesalahan maka akan di konfirmasi untuk melakukan revisi yang kemudian di kumpulkan di Kemenag.

2. Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Madrasah yang telah lolos RKAM maka akan dilakukan pengawasan. Pengawasan ini di lakukan untuk memeriksa kembali dan meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah. Selama ini pengawasan dilakukan oleh tim pengawas. Kepala Madrasah dan Bendahara di kumpulkan di suatu tempat untuk di Audit. Saat pelaksanaan mereka harus mampu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pembiayaan di madrasah. Apabila setelah audit masih terdapat kesalahan maka madrasah harus melakukan revisi kembali.

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan sebuah konsep dan sistem perencanaan yang matang, supaya bisa merumuskan system pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Manajemen pembiayaan penting dilakukan oleh setiap madrasah. Hal ini sangat

membantu madrasah di dalam mengelola anggaran madrasah dalam setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran madrasah melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pemeriksaan anggaran. Anggaran pemerintah yang diperoleh oleh MI Tarbiyatul Athfal berupa dana BOS. Pada tahap perencanaan madrasah melakukan RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah), tahap pelaksanaan madrasah melakukan pembukuan dan pelaporan dana BOS, dan tahap pengawasan dan pemeriksaan anggaran dana BOS madrasah mengikuti Audit yang diselenggarakan oleh Tim Pengelola Dana BOS. Pengelolaan manajemen pembiayaan di madrasah sudah efektif dan efisien dibuktikan dengan tidak adanya kekeliruan, kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan dana dari perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta madrasah dapat mengajukan anggaran dana BOS tahun Anggaran 2021.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah berkenan mempersilahkan saya untuk melakukan penelitian di MI Tarbiyatul Athfal Tugurejo, sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Syukri Nasution. (2022). Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Menunjang Proses Pendidikan di Perguruan

Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 2(3), 82–87. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v2i3.343>

Ason, A., & Mardiana, M. (2020). Analisis Implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Kabupaten Sintang. *Bestari: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 44–53. <https://doi.org/10.46368/bjpd.v1i2.199>

Fadhila, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Universitas Negeri Yogyakarta. Manajemen_Pembiayaan_Pendidikan_untuk_Meningkatkan_Mutu_Pendidikan*

Haryati, S. (2012). Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Magelang. *Journal of Economic Education*, 1(1), 64–70.

Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>

Maliki, M., Sadali, I., & Murtafiah, N. H. (2022). Analisis Model-Model Manajemen Pembiayaan. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 01(04), 169–178.

Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Institusi Pendidikan). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.10>

Sukoco, J. B. (2019). Administrasi Pendidikan Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa. *Maret*, 3(3), 342–349.

Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.

Wirian. (2022). Model-Model Pembiayaan Pendidikan. *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 44–56. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/%0Ahttps://ejurnalilmiah.com/index.php/Educate/article/download/211/240>